

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN ANGGARAN 2025 (UN.AUDIT)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. LkjIP ini memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang.

Kuala Tungkal, 10 - 03 - 2026



KEPALA BAPENDA

SUGIANTO, SE, MM

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Organisasi.....	7
1.5. Sistematika Penyajian.....	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja	11
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Bapenda	12
3.2. Realisasi Anggaran	47
Bab IV PENUTUP.....	49

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Melalui laporan ini dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja organisasi, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5).
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

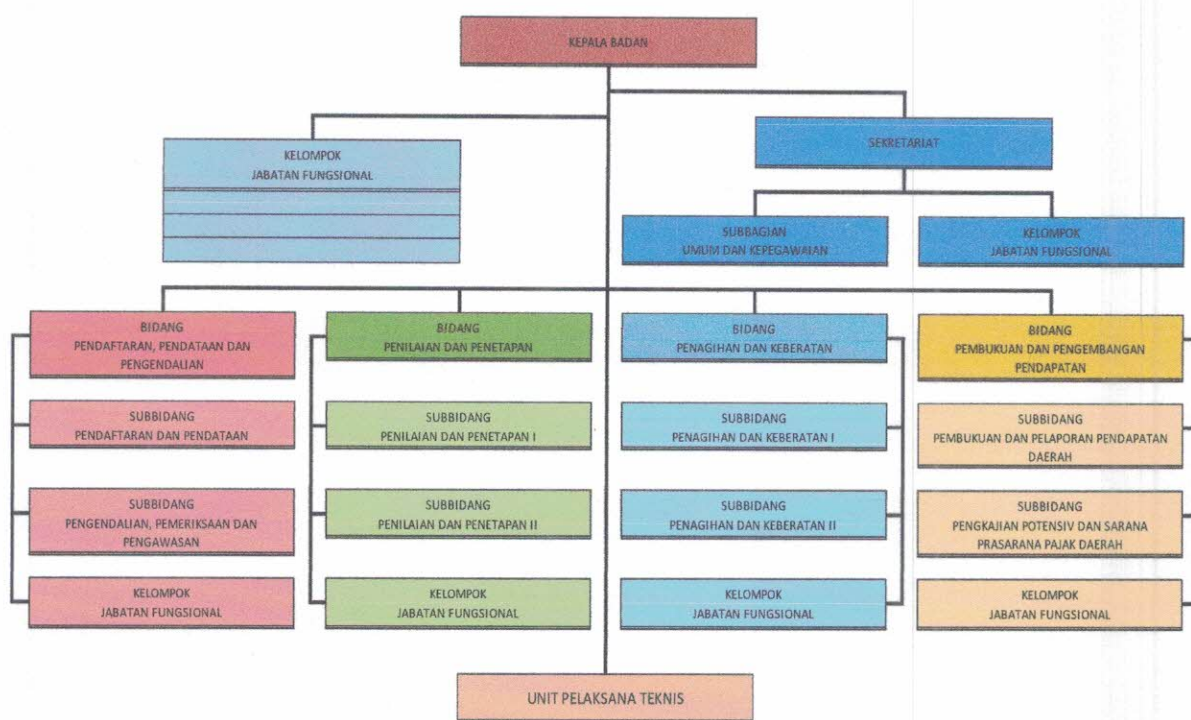
1.3 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pengembangan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian terdiri atas :
 1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
 2. Sub bidang Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Penilaian dan Penetapan terdiri atas:
 1. Sub bidang Penilaian dan Penetapan I
 2. Sub bidang Penilaian dan Penetapan II
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- d. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri atas :
 1. Sub bidang Penagihan dan Keberatan I
 2. Sub bidang Penagihan dan Keberatan II
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
 2. Sub bidang Pengkajian Potensi dan Sarana prasarana Pajak Daerah\
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sumber Daya Aparatur

Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sejumlah 114 orang yang terdiri dari 44 orang PNS, 5 orang PPPK dan 55 orang PPPK dan 10 orang non ASN yang di distributorkan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Bidang	PNS	PPPK	PPPK PW	Non ASN	Jumlah
1.	Sekretariat	11	2	18	1	32
2.	Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian	8	-	6	4	18
3.	Penilaian dan Penetapan	8	2	12	3	25
4.	Penagihan dan Keberatan	10	1	10	2	23
5.	Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	7	-	9		16
Jumlah		44	5	55	10	114

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sarana kerja yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah :

URAIAN	BANYAKNYA
KOMPUTER	
- Mini Komputer	1
- PC Unit	46
- Laptop	43
- Tablet /Gadget	23
- Komputer Jaringan Lainnya/server	7
- Personal Komputer Lainnya	41
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	114
- Scanner (Paralatan Personal Komputer)	3
- Harddisk Internal/External	9
- Server	3
- Router	3
- Hub	3
- Peralatan Jaringan lainnya	8
PERALATAN OLAH RAGA	
- Peralatan Olah Raga Lainnya (dst)	1
ALAT ANGKUTAN	
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7
- Sepeda Motor	35
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
- Global Positioning System (GPS)	3
- Alat Pengukur Garis Tengah	3
- Alat ukur lain-lain lainnya	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
- Mesin Hitung Liskrik	1
- Mesin Kas Register	10
- Lemari Arsip 2 Pintu	6
- Lemari Arsip Kayu	2
- Lemari Besi/Metal	85
- Rak Besi	2
- Filing Cabinet Basi	3
- Brandkas	2
- Lemari Kaca	5
- CCTV	1
- Papan Visual/Papan Nama	53
- Alat Penghancur Kertas	6
- Mesin Absensi	1
- Papan Nama Instansi	1
- Papan Pengumuman	34
- Papan Tulis	2
- Teralis	1
- Alat Kantor Lainnya	5
- Meja Kerja Kayu/Rotan	15
- Kursi Besi dan Metal	280
- Kursi Putar	2
- Meja Rapat	3
- Meja Panjang	8
- Meja ½ Biro	28
- Kursi Fiber Glas/Plastik	1
- Kursi Tamu	13
- Meja Komputer	35
- Alat Pembersih lainnya	4
- Lemari Es	1
- AC Split	48
- Kipas Angin	4
- Televisi	7

- Sound System	3
- Unit Power Supply	43
- Stabilisator	7
- Camera film	2
- Alat Hiasan	17
- Tangga Aluminium	1
- Mimbar/Podium	1
- Hardy Cam	1
- Karpet	10
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	5
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	22
- Lemari Arsip	12
- Mesin Tik	1
- Box Plastik	10
- Exhaust Fan	10
- Kotak Surat	20
ALAT STUDIO, KOMUNIKAST DAN PEMANCAR	
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
- Digital LED Running Text	3
- Layar Film/Projector	4
- Camera Digital	3
- Mesin Cetak Listrik Sheet	2
- Mesin Cetak Elektronik	1
- Facsimile	1
- Microphone	2
- Genset	1

3. Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tertuang dalam DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	PAD yang dikelola BAPENDA	Rp. 53.655.509.216
	- Pajak Daerah	Rp. 53.624.259.216
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pendapatan Denda Pajak)	Rp. 31.350.000
2	Belanja	Rp. 13.653.679.833
	- Belanja Operasional	Rp. 13.244.364.883
	- Belanja Modal	Rp.409.314.950

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penggalian potensi pajak daerah, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan agar pengelolaan pendapatan berjalan profesional, efektif, dan adaptif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
2. Perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan, peningkatan kompetensi teknis, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan perpajakan yang masih perlu ditingkatkan guna menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
5. Kebutuhan pengembangan dan integrasi sistem informasi perpajakan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini di uraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini di uraikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Perencanaan kinerja merupakan komitmen antara pimpinan instansi dengan pimpinan yang lebih tinggi untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang harus dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, yaitu: **“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”**, yang memiliki makna:

- **BERKAH** : Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis.
- **MADANI** : Mandiri dan berinovasi.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi langsung dalam mendukung misi kedua, yaitu: “Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Utama “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

**TARGET PENDAPATAN DAERAH
PADA RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	1,247,761,849,420.00	1,150,000,000,000.00	1,199,800,001,000.00	1,243,840,001,500.00	1,299,812,800,000.00	1,364,803,440,500.00
I	Pendapatan Asli Daerah	120,000,000,000.00	96,135,351,000.00	101,660,000,000.00	111,945,600,000.00	123,482,215,500.00	136,480,344,500.00
1	Pajak Daerah	36,596,319,500.00	36,304,197,500.00	38,122,500,000.00	41,979,600,000.00	46,688,419,500.00	49,815,325,500.00
2	Retribusi Daerah	3,175,100,000.00	2,295,170,000.00	3,558,100,000.00	5,597,280,000.00	7,408,933,000.00	9,553,624,500.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,238,139,900.00	11,226,000,000.00	12,707,500,000.00	13,993,200,000.00	15,435,277,000.00	17,060,043,000.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	66,990,440,600.00	46,309,983,500.00	47,271,900,000.00	50,375,520,000.00	54,949,586,000.00	60,051,351,500.00
II	Dana Transfer	1,088,436,649,420.00	1,010,039,349,000.00	1,052,342,562,500.00	1,083,807,091,000.00	1,125,838,908,500.00	1,175,306,836,500.00
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	244,465,259,000.00	244,518,751,000.00	251,854,313,500.00	259,409,943,000.00	269,786,341,000.00	281,926,726,000.00
2	Dana Alokasi Umum	495,245,924,000.00	479,384,508,000.00	488,972,198,500.00	503,641,364,500.00	518,750,605,500.00	534,313,123,500.00
3	Dana Alokasi Khusus	166,169,575,000.00	117,228,229,000.00	117,957,501,000.00	117,392,291,500.00	123,562,447,000.00	134,341,003,500.00
4	DID (Dana Insentif Daerah)	25,251,347,000.00	7,575,404,000.00	25,251,347,000.00	27,776,482,000.00	30,554,129,500.00	33,609,542,500.00
5	Dana Desa dan Desa Adat	109,187,748,000.00	109,187,748,000.00	113,555,258,000.00	118,097,468,500.00	122,821,367,000.00	127,734,221,500.00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Dari	46,616,796,420.00	52,144,709,000.00	54,751,944,500.00	57,489,541,500.00	60,364,018,500.00	63,382,219,500.00

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
	Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya						
7	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintahan Daerah Lainnya	1,500,000,000.00	0.00	0.00			
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
1	Hibah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6,19%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,06
		- Nilai Akip	78,44

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dari Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 berdasarkan target Tahunan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 :

Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6,19%	30,01%	484,78%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,06	82,06	100%
		- Nilai AKIP	78,44	81,05	103,33%

Pengukuran kinerja terhadap target indikator pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. SASARAN 1 :

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

dengan Indikator Kinerja Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dengan Target 6,19%. Dimana pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun transisi sekaligus tahun pertama pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat perubahan fundamental pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran Strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada periode Renstra sebelumnya (2021-2024), kinerja diukur melalui indikator "Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah". Namun, mulai tahun 2025, indikator tersebut diubah menjadi "Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah".

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PAD Yang Dikelola

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah			PAD yang dikelola BAPENDA		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1.	Pajak Daerah	53,624,259,216.00	71,499,582,088.60	133.33	53,624,259,216.00	71,499,582,088.60	133.33
	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pajak Reklame	514,000,000.00	469,201,557.00	91.28	514,000,000.00	469,201,557.00	91.28
	Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pajak Air Bawah Tanah	540,000,000.00	404,165,358.00	74.85	540,000,000.00	404,165,358.00	74.85
	Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00	51,850,000.00	86.42	60,000,000.00	51,850,000.00	86.42
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	3,282,867,460.00	164.14	2,000,000,000.00	3,282,867,460.00	164.14
	PBB P2	5,300,000,000.00	4,662,955,617.00	87.98	5,300,000,000.00	4,662,955,617.00	87.98
	BPHTB	5,500,000,000.00	3,021,585,236.00	54.94	5,500,000,000.00	3,021,585,236.00	54.94
	PBJT	23,657,866,459.00	34,451,052,360.60	145.62	23,657,866,459.00	34,451,052,360.60	145.62
	Opsen PKB	8,719,372,450.00	12,329,544,500.00	141.40	8,719,372,450.00	12,329,544,500.00	141.40
	Opsen BBNKB	7,333,020,307.00	12,826,360,000.00	174.91	7,333,020,307.00	12,826,360,000.00	174.91
2.	Retribusi Daerah	46,228,769,016.00	35,284,013,217.00	76.32	-	-	-
	Retribusi Jasa Umum	43,283,329,016.00	32,892,426,520.00	75.99	-	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	1,444,440,000.00	1,134,858,680.00	78.57	-	-	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	1,501,000,000.00	1,256,728,017.00	83.73	-	-	-
3.	Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,612,944,001.00	12,573,181,989.21	108.27	-	-	-
	Bank Jambi (Deviden)	10,336,062,000.00	11,490,413,029.21	111.17	-	-	-
	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1,276,882,001.00	1,082,768,960.00	84.80	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35,124,291,362.00	60,106,355,869.40	171.12	31,350,000.00	91,568,617.00	292.05
	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	244,000,000.00	1,932,838,380.00	792.15	-	-	-
	Jasa Giro	3,348,100,000.00	2,912,953,198.37	87.00	-	-	-
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	260,000,000.00	201,750,000.00	77.60	-	-	-
	Pendapatan Bunga	3,520,000,000.00	3,359,727,681.49	95.45	-	-	-
	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	3,056,742.78	0.00	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak	31,350,000.00	91,568,617.00	292.00	31,350,000.00	91,568,617.00	292.00
	Pendapatan Dari Pengembalian	6,818,200,500.00	21,458,226,919.87	314.72	-	-	-
	Pendapatan BLUD	20,902,640,862.00	30,146,234,329.89	144.22	-	-	-
	Jumlah PAD	146,590,263,595.00	179,463,133,164.21	122.43	53,655,609,216.00	71,591,150,705.60	133.43
	(1+2+3+4)						

Adapun cara untuk mengukur Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\frac{PAD\ th\ Berjalan - PAD\ th\ Sebelumnya}{PAD\ th\ Sebelumnya} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Rp. 179.463.133.164,21 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Sebesar Rp.138.039.895.430,37 Jadi, Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

$$\frac{Rp.179.463.133.164,21 - Rp. 138.039.895.430,37}{Rp. 138.039.895.430,37} \times 100\% = 30,01\%$$

Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} = \frac{30,01\%}{6,19\%} \times 100\% = 484,78\%$$

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dari Target 6,19% terealisasi 30,01% dengan Capaian Kinerja 484,78%. Yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 133,33%, Retribusi Daerah terealisasi 76,32%, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan terealisasi 108,27% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi 171,12% dari masing-masing Target Penerimaan 100%. Penerimaan Pajak Daerah terealisasi sebesar 133,43%, ini disebabkan: Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target diantaranya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya akan terus Kami upayakan dan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara:

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Perkembangan realisasi penerimaan daerah merupakan instrumen krusial untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal dan kemandirian daerah secara berkelanjutan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2025), Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi daerah yang dinamis, yang secara langsung berkontribusi pada fluktuasi penerimaan daerah. Penyajian data realisasi kurun waktu 2021-2025 ini menggambarkan dua fase penting perjalanan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Fase pertama (2021-2024) mencerminkan upaya pemulihan pasca-pandemi serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan regulasi lama. Fase kedua, yang dimulai pada tahun 2025, menjadi titik balik baru dengan adanya restrukturisasi jenis pendapatan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (HKPD). Pertumbuhan PAD yang cukup tinggi pada tahun 2025 didorong oleh penguatan pajak daerah serta adanya perubahan kebijakan nasional. Melalui aturan baru, kini penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan (PKB dan BBNKB) dan opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) langsung masuk dalam bagian PAD Kabupaten. Tabel berikut menunjukkan perkembangan angka tersebut secara lebih jelas:

Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	T A H U N														
		2021			2022			2023			2024			2025		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	PAJAK DAERAH	36.171.319.500,00	31.635.068.045,00	87,58	31.194.696.093,00	33.014.871.695,00	105,83	32.449.222.773,00	35.478.535.503,00	109,34	35.862.884.126,00	33.570.220.578,00	93,61	53.624.259.216,00	71.499.582.088,60	133,33
	- Pajak Hotel	119.950.000,00	185.104.100,00	154,32	180.000.000,00	304.600.067,00	169,22	428.500.000,00	501.754.583,00	117,10	428.500.000,00	591.976.652,00	138,15			
	- Pajak Restoran	3.620.000.000,00	4.076.735.186,00	112,62	3.787.000.000,00	4.711.011.323,00	124,40	4.491.372.773,00	3.770.077.545,00	83,95	4.712.000.000,00	3.355.747.586,00	71,22			
	- Pajak Hiburan	11.840.000,00	3.994.500,00	30,36	5.000.000,00	3.844.350,00	76,89	7.350.000,00	9.344.900,00	123,77	15.000.000,00	15.629.600,00	104,20			
	- Pajak Reklame	436.000.000,00	354.084.745,00	81,21	500.000.000,00	422.908.324,00	84,58	514.000.000,00	367.964.398,00	71,59	514.000.000,00	420.474.838,00	81,80	514.000.000,00	469.201.557,00	91,28
	- Pajak Penerimaan Jaminan	18.125.239.000,00	18.073.916.242,00	99,72	13.870.000.000,00	17.010.434.126,00	122,64	14.000.000.000,00	16.651.172.549,00	118,79	17.160.434.126,00	18.202.300.149,00	106,07			
	- Pajak Parkir	20.900.000,00	30.566.400,00	146,25	35.000.000,00	40.509.600,00	115,74	65.000.000,00	46.775.700,00	71,96	25.900.000,00	56.984.400,00	220,02			
	- Pajak Air Tanah	63.000.000,00	21.101.355,00	33,49	81.900.000,00	21.270.828,00	25,97	82.000.000,00	25.084.172,00	30,59	350.000.000,00	537.980.555,00	153,71	540.000.000,00	404.165.538,00	74,85
	- Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52	295.000.000,00	78.461.000,00	26,60	295.000.000,00	52.576.000,00	17,82	52.000.000,00	59.456.000,00	114,34	60.000.000,00	51.850.000,00	86,42
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.574.390.500,00	1.584.866.425,00	103,97	1.574.390.500,00	1.330.895.000,00	87,31	1.645.800.000,00	2.073.029.000,00	125,96	1.685.050.000,00	1.655.999.320,00	98,28	2.000.000.000,00	3.282.867.460,00	164,14
	- Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.500.000.000,00	4.582.644.329,00	83,32	5.500.000.000,00	4.610.394.882,00	83,83	5.500.000.000,00	4.810.342.247,00	87,46	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	84,40	5.500.000.000,00	4.662.955.617,00	87,98
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	2.607.409.963,00	40,11	5.416.405.993,00	4.480.491.795,00	82,72	5.420.000.000,00	7.189.814.409,00	132,65	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	74,39	5.500.000.000,00	3.021.585.236,00	54,94
	- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)													23.657.866.459,00	34.451.052.360,60	145,62
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)													8.719.372.450,00	12.329.544.500,00	141,40	
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)													7.335.020.307,00	12.826.360.000,00	174,91	
RETRIBUSI DAERAH	3.430.808.796,00	2.565.707.272,00	74,78	2.581.266.250,00	2.422.698.993,17	93,86	2.313.111.853,00	2.573.298.395,00	111,3	1.938.500.000,00	2.585.587.944,64	152,5	46.228.769.016,00	35.284.013.217,00	76,32	
- Retribusi Jasa Umum	1.740.708.796,00	1.232.171.653,00	70,79	1.626.266.250,00	1.302.403.818,00	92,38	1.032.111.853,00	1.118.585.253,00	108,38	311.500.000,00	257.500.000,00	82,66	43.283.379.016,00	32.892.426.520,00	75,99	
- Retribusi Jasa Usaha	788.600.000,00	777.082.200,00	98,54	755.000.000,00	828.095.200,00	109,68	730.000.000,00	955.815.700,00	130,93	927.000.000,00	1.132.012.000,00	122,12	1.444.440.000,00	1.134.858.680,00	78,57	
- Retribusi Perizinan Tertentu	901.500.000,00	556.453.419,00	61,73	200.000.000,00	92.199.375,17	46,1	551.000.000,00	498.897.442,00	90,54	700.000.000,00	1.566.075.944,64	223,73	1.501.000.000,00	1.256.728.017,00	83,73	
HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DIPSAHKAN	13.238.139.900,00	10.719.917.975,50	80,98	11.226.000.000,00	11.703.638.997,40	104,25	13.495.329.143,00	12.443.280.638,06	92,20	13.495.329.143,00	12.456.747.996,37	92,30	11.613.944.001,00	12.573.181.989,21	108,27	
- Bank Jambi (Deposito)	11.732.139.900,00	9.638.772.829,50	82,16	9.796.000.000,00	10.528.936.340,30	107,48	12.113.000.000,00	11.188.346.843,74	92,37	12.113.000.000,00	11.453.060.328,10	94,55	10.336.062.000,00	11.490.413.029,21	111,17	
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.506.000.000,00	1.081.145.146,00	71,79	1.430.000.000,00	1.174.702.057,10	82,15	1.382.329.143,00	1.254.933.791,32	90,78	1.382.329.143,00	1.003.687.568,27	72,61	1.276.882.001,00	1.082.768.960,00	84,80	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.659.325.510,00	73.606.750.715,14	108,79	79.643.348.500,00	83.338.855.808,81	104,68	77.351.418.901,00	76.327.885.897,40	101,26	67.395.936.734,00	89.057.339.211,36	132,14	35.124.291.562,00	60.106.355.860,40	171,12	

Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	T A H U N														
		2021			2022			2023			2024			2025		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	593,000,000.00	517,783,060.00	131.75	582,000,000.00	958,302,540.00	164.66	170,000,000.00	822,762,840.00	483.98	166,000,000.00	183,652,640.00	110.63	244,000,000.00	1,932,838,380.00	792.15
	- Jasa Giro	700,000,000.00	2,075,367,698.41	296.48	500,000,000.00	5,928,591,441.71	1185.72	4,400,000,000.00	5,425,953,982.31	123.32	2,000,000,000.00	3,374,686,460.69	168.73	3,348,100,000.00	2,912,953,198.37	87.00
	- Hasil Penghasilan Dana Beryangir	395,016,510.00	5,452,260.00	1.38	765,674,600.00			10,000,000.00				5,776,000.00	1.09	260,000,000.00	201,750,000.00	77.60
	- Pendapatan Bungan	12,550,000,000.00	12,601,452,027.92	100.41	8,000,000,000.00	4,877,506,870.45	60.97	12,356,310,084.00	8,502,600,975.68	68.92	4,000,000,000.00	15,156,181,395.47	378.90	3,520,000,000.00	3,359,727,681.49	95.45
	- Pendapatan Aset Tetap dan Keuntungan Kegiatan Usaha Daerah		4,516,000.00	-		39,933,000.00										
	- Pendapatan Daerah		119,174,666.26	-		63,535,239.11			49,707,794.56					3,056,742.78		
	- Pendapatan Ketersediaan Kekayaan Pektarian		117,174,666.26	1176.36	26,350,000.00	58,672,782.00	222.67	26,350,000.00	82,446,543.00	312.51	31,350,000.00	58,746,456.00	187.39	31,350,000.00	91,568,617.00	292.05
	- Pendapatan Daerah Pajak Daerah	10,000,000.00														
	- Pendapatan Daerah	5,810,000,000.00	4,430,390,728.55	76.25	7,001,000,000.00	2,133,458,994.09	30.47	8,512,272,682.00	6,703,600,559.64	78.75	817,200,500.00	7,616,714,530.87	932.05	6,818,200,500.00	21,458,256,919.87	314.72
	- Pendapatan BBLUD	36,350,000,000.00	42,696,273,188.00	117.46	51,316,014,900.00	58,687,370,216.45	114.36	51,896,486,135.00	56,740,913,202.21	109.33	59,851,386,234.00	62,661,581,738.33	104.70	20,502,640,862.00	30,146,234,529.89	144.22
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11,451,309,000.00	10,992,857,875.00	96.00	11,451,309,000.00	10,591,484,725.00	92.49									
	- Pendapatan Daerah atas Pelaksanaan Perumahan Daerah		26,862,000.00	-												
	- Pendapatan dari Perencanaan Lainnya		17,984,800.00	-												
	Jumlah PAD	120,449,593,706.00	118,526,444,007.64	98.40	124,644,311,343.00	130,480,014,294.38	104.68	125,609,082,670.00	128,823,000,430.46	102.56	118,692,650,003.00	138,039,895,430.37	116.30	146,590,263,595.00	179,463,133,164.21	122.43
5.	PENDAPATAN TRANSFER	1,182,004,537,563.00	1,375,003,659,863.00	116.33	1,250,224,459,160.00	1,534,305,841,135.00	122.72	1,324,886,356,820.00	1,364,638,482,085.00	103.00	1,974,609,610,848.00	1,871,370,786,390.00	97.23	1,932,415,899,162.00	1,856,626,940,964.00	96.08
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,123,019,828,705.00	1,306,889,767,885.00	116.37	1,174,968,061,000.00	1,456,342,060,145.00	123.95	1,233,788,648,849.00	1,274,400,774,114.00	103.29	1,834,391,787,000.00	1,801,661,723,106.00	98.22	1,848,691,101,000.00	1,777,979,083,034.00	96.18
	- Dana Penunjang	988,580,733,703.00	1,172,474,050,195.00	118.60	1,067,821,796,000.00	1,349,195,793,145.00	126.35	1,117,214,723,849.00	1,157,836,849,114.00	103.64	1,713,851,127,000.00	1,681,121,063,106.00	98.09			
	- Dana Insentif Daerah (DID)	25,251,347,000.00	25,251,347,000.00	100.00	11,445,780,000.00	11,445,780,000.00	100.00	17,494,167,000.00	17,494,167,000.00	100.00	7,239,827,000.00	7,239,827,000.00	100.00			
	- Dana Desa	109,187,748,000.00	109,164,370,690.00	99.98	95,700,485,000.00	95,700,485,000.00	100.00	99,079,758,000.00	99,079,758,000.00	100.00	97,953,393,000.00	100,455,713,000.00	103.04	97,926,532,000.00	96,986,676,760.00	99.04
	- Dana Bagi Hasil (DBH)															
	- Dana Alokasi Umum (DAU)															
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)															
	- Insentif Fiskal															
	- Pendapatan Transfer Pemerintah	58,984,708,858.00	68,113,891,976.00	115.48	75,256,398,160.00	77,963,780,990.00	103.60	91,097,707,971.00	90,237,707,971.00	99.06	90,217,823,848.00	69,769,063,284.00	77.27	83,724,798,162.00	78,647,857,930.00	93.94

Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	T A H U N														
		2021			2022			2023			2024			2025		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Daerah															
	-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	52.144.708.858,00	60.073.891.976,00	115,21	61.856.398.160,00	64.563.780.990,00	104,38	77.047.707.971,00	77.047.707.971,00	100,00	76.167.823.848,00	65.039.063.284,00	85,39			
	-Pendapatan Bagi Hasil															
	-Bantuan Keuangan dari Provinsi	6.840.000,00	8.040.000,00	117,54	13.400.000,00	13.400.000,00	100,00	14.050.000,00	13.190.000,00	93,88	14.050.000,00	4.670.000,00	33,24	64.854.798.162,00	60.577.857.990,00	93,41
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.483.350,00	46.869,026.824,00	107,79	942.142.858,00	196.507.214,00	20,84									
6.	-Pendapatan Hibah	43.483.350,00	46.869,026.824,00	107,79												
	-Pendapatan Dana Kapsitasi JKN pada FKTP				942.142.858,00	196.507.214,00	20,84									
	Jumlah Penerimaan	1.545.937.481.269,00	1.540.399.130.692,64	114,45	1.375.810.913.261,00	1.664.982.162.643,38	121,02	1.450.495.439.490,00	1.493.461.482.515,46	103	2.043.302.260.851,00	2.009.410.681.820,37	98,34	2.079.006.162.757,00	2.036.090.074.128,21	97,94

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2025 terjadi Peningkatan, dimana Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Rp.2.009.410.681.820,37 sedangkan Tahun 2025 meningkat menjadi Rp.2.036.090.074.128,21. Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024-2025 terjadi Peningkatan, Realisasi PAD Tahun 2024 Sebesar Rp. 138.039.895.430,37 sedangkan Realisasi Tahun 2025 sebesar Rp. 179.463.133.164,21. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dari Target 6,19% terealisasi sebesar 30,01% dengan Capaian sebesar 484,78%. Sedangkan untuk Tingkat pertumbuhan tahun 2024 dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{PAD\ th\ Berjalan - PAD\ th\ Sebelumnya}{PAD\ th\ Sebelumnya} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Rp. 138.039.895.430,37 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 Sebesar Rp. 128,823,000,430.46 Jadi, Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

$$= \frac{Rp. 138.039.895.430,37 - Rp. 128,823,000,430.46}{Rp. 128,823,000,430.46} \times 100\% = 7,15\%$$

Sehingga dapat dilihat terjadi tren peningkatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025, lonjakan pertumbuhan PAD sebesar 30,01% pada tahun 2025 merupakan dampak langsung dari pemberlakuan secara penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Mulai tahun anggaran 2025, terdapat perubahan struktur penerimaan daerah di mana skema Bagi Hasil Pajak Provinsi berubah menjadi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta adanya penerapan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan penerapan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Khususnya di Pajak Penerangan Jalan. Pengalihan ini menyebabkan penerimaan tersebut kini dicatat langsung sebagai komponen PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara nominal meningkatkan basis perhitungan PAD secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b) Pendapatan Transfer

Penerimaan Pendapatan Transfer Mengalami Peningkatan dari Tahun Sebelumnya, Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2024 Sebesar Rp. 1.871.370.786.390,00 dari Target Rp. 1.924.609.610.848,00 atau 97,23% sedangkan Realisasi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.856.626.940.964,00 dari Target Rp. 1.932.415.899.162,00 atau 96,08%. Pendapatan Transfer Terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun 2025 tidak ada Penerimaan dari alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

d) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi		Jumlah
	Pajak Daerah	Lain-lain PAD yang sah	
2021	31.635.068.045,00	117.636.411,00	31.752.704.456,00
2022	33.014.821.695,00	58.672.782,00	33.073.494.477,00
2023	35.478.535.503,00	82.346.543,00	35,560,882,046.00
2024	33.570.220.578,00	58.746.436,00	33.628.967.014.00
2025	71.499.593.338,60	91.557.367,00	71.591.150.705,60

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2021 - 2025 mengalami Peningkatan.

e) Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kontribusi Penerimaan PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Tahun 2021-2025.

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2021	1.540.399.130.692,64	118.526.444.007,64	7,69	31.752.704.456,00	2,06	26,79
2022	1.665.016.502.341,07	130.480.014.294,38	7,84	33.073.494.477,00	1,99	25,35

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2023	1.493.456.728.515,46	128.818.246.430,46	8,63	35.560.882.046,00	2,38	27,61
2024	2.009.410.681.820,37	138.039.895.430,37	6,87	33.628.967.014,00	1,67	24,36
2025	2.036.090.074.128,21	179.463.133.164,21	8,81	71.591.150.705,60	3,52	39,89

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2025 berkisar di atas 6% - 8%, sedangkan Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2025 hanya berkisar antara 1% - 3%, untuk tahun 2025 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 8,81%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 3,52% dan Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 39,89%.

2. Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan RPJMD Menurut Urusan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030

Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2025 sampai dengan 2030, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
				Tahun I 2025	Tahun II 2026	Tahun III 2027	Tahun IV 2028	Tahun V 2029	Tahun VI 2030	Tahun I 2025	Tahun II 2026	Tahun III 2027	Tahun IV 2028	Tahun V 2029	Tahun VI 2030	Tahun I 2025	Tahun II 2026	Tahun III 2027	Tahun IV 2028	Tahun V 2029	Tahun VI 2030
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2,30%	6,19%	1,50%	1,70%	1,90%	2,10%	2,30%	30,01%	-	-	-	-	-	484,78%	-	-	-	-	-
		- Jumlah Objek Pajak Terdaftar	118.590 Objek Pajak	110.694 Objek Pajak	111.530 Objek Pajak	113.295 Objek Pajak	115.060 Objek Pajak	116.825 Objek Pajak	118.590 Objek Pajak	109.819 Objek Pajak	-	-	-	-	-	99,21%	-	-	-	-	-
		- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan	678.669 Lembar	110.339 Lembar	111.449 Lembar	112.554 Lembar	113.664 Lembar	114.779 Lembar	115.884 Lembar	109.920 Lembar	-	-	-	-	-	99,62%	-	-	-	-	-
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi atau edukasi pajak	2.685 Orang	510 Orang	435 Orang	435 Orang	435 Orang	435 Orang	435 Orang	555 Orang	-	-	-	-	-	108,82%	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Daerah (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
				Tahun I 2025	Tahun II 2026	Tahun III 2027	Tahun IV 2028	Tahun V 2029	Tahun VI 2030	Tahun I 2025	Tahun II 2026	Tahun III 2027	Tahun IV 2028	Tahun V 2029	Tahun VI 2030	Tahun I 2025	Tahun II 2026	Tahun III 2027	Tahun IV 2028	Tahun V 2029	Tahun VI 2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- Jumlah surat pembayaran pajak daerah yang diterima	754.154 Lembar	122.863 Lembar	123.992 Lembar	125.124 Lembar	126.259 Lembar	127.399 Lembar	128.517 Lembar	102.453 Lembar	-	-	-	-	-	83,39%	-	-	-	-	-
		- Jumlah surat pelaporan pajak daerah yang diterima	75.485 Lembar	12.524 Lembar	12.543 Lembar	12.570 Lembar	12.595 Lembar	12.620 Lembar	12.633 Lembar	13.229 Lembar	-	-	-	-	-	105,63%	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP - Persentase pemenuhan komponen IKM - Persentase pemenuhan komponen SAKIP	82,06 81,05 100% 100%	82,06 81,00 100% 100%	82,30 81,02 100% 100%	82,40 81,03 100% 100%	82,50 81,05 100% 100%	82,60 81,05 100% 100%	82,06 81,05 100% 100%	82,06 81,05 100% 100%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	100% 103,33% 100% 100%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun pertama (2025) sebesar 30,01% secara administratif telah melampaui target akhir Renstra. Namun, perlu dijelaskan bahwa lonjakan ini merupakan kondisi khusus yang disebabkan oleh:

1. Faktor Regulasi: Implementasi pertama Opsen PKB dan BBNKB (UU HKPD) yang menciptakan basis penerimaan baru.
2. Faktor Insidental: Adanya setoran pajak dari objek pajak tertentu yang bersifat *one-time payment* (sekali bayar) dan tidak berulang di tahun-tahun mendatang.

Mengingat tahun 2025 telah membentuk Basis Data (*Baseline*) yang sangat tinggi, maka pertumbuhan di tahun kedua (2026) hingga tahun kelima (2029) diproyeksikan akan melandai. Fokus organisasi pada sisa periode Renstra bukan lagi pada lonjakan persentase, melainkan pada Stabilitas Realisasi Nominal agar tidak turun dari level yang telah dicapai pada tahun 2025. Hal ini akan menjadi dasar bagi instansi untuk melakukan revaluasi target Renstra pada periode perubahan agar tetap realistis dan akuntabel.

3. Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO.	JENIS PENERIMAAN	2025		ALASAN
		TARGET	REALISASI %	
A.	PAJAK DAERAH	53.624.259.216,00	71.499.582.088,60 133,33	
1.	Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Reklame Kain/Spanduk	514.000.000,00 460.000.000,00 54.000.000,00	469.201.557,00 316.445.057,00 152.756.500,00	Realisasi pajak Reklame tidak mencapai target disebabkan : - Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap reklame liar atau tidak berizin. - Perubahan kebijakan terkait tarif pajak yang mempengaruhi pendapatan pajak reklame. - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak reklame. - Berkurangnya vendor-vendor besar dalam penyelenggaraan reklame dalam wilayah kab. tanjab barat
2.	Pajak Air Bawah Tanah	540.000.000,00	404.165.358,00 74,85	Realisasi Pajak Air Bawah Tanah tidak mencapai target disebabkan : - Kesulitan dalam pendataan/sulitnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah air tanah yang digunakan (amper meter) - Tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan pemanfaatan air tanah. - Tidak ada sanksi hukum terhadap Masyarakat yang tidak mempunyai izin penggunaan air tanah. - Adanya efisiensi pengguna dan pemanfaatan air tanah oleh WP.
3.	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	51.850.000,00 86,42	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target disebabkan: - Berkurangnya populasi burung walet di wilayah kabupaten tanjung

					<p>jabung barat dikarenakan polusi udara dan migrasi ke wilayah yang memiliki ketersediaan pakan lebih memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga sarang burung walet berdampak pada menurunnya nilai transaksi yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak sarang burung walet. - Penyelewengan atau pengurangan jumlah sarang walet yang dilaporkan dan tidak adanya lagi asosiasi sarang burung walet yang aktif di kabupaten tanjung jabung barat. - Masih rendahnya Tingkat kesadaran dan kepatuhan Sebagian wajib pajak dalam melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 				
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tanah Liat Batu Split Tanah Laterik Tanah Serap (Fullers Earth)	2.000.000.000,00 1.300.000,00 675.000.000,00 1.208.700.000,00 115.000.000,00	3.282.867.460,00 - 1.986.639.840,00 1.258.267.620,00 37.960.000,00	164,14 - 294,32 104,10 33,01	<p>Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melebihi target sebesar 64,14% disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya peningkatan produksi dikarenakan peningkatan permintaan pasar khususnya dalam proyek strategis nasional pembuatan jalan tol. - Pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. - Kesadaran WP yang semakin tinggi dalam pelaporan. 				
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.300.000.000,00	4.662.955.617,00	87,98	<p>Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan tidak mencapai target disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kepatuhan wajib pajak/kurangnya kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak. - Masalah banyaknya ditemukan SPPT yang tidak valid, SPPT ganda dan tidak ditemukan objeknya. 				

6.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00	3.021.585.236,00	54,94	<p>Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak mencapai target di sebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan permohonan BPHTB bersifat insidental (tidak dapat dipaksakan) ,untuk pemungutan BPHTB, khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dilakukan pemungutan/ pembayaran sesuai dengan SK menteri perumahan dan kawasan pemukiman, menteri pekerjaan umum dan menteri dalam negeri nomor nomor : 03/HK/KPTS/Mn/2024, nomor : 3015/KPTS/M/2024, nomor : 600.10-4849 tahun 2024 tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah, dan tidak ada permohonan Hak Guna Usaha (HGU) di tahun 2025
7.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23.657.866.459,00	34.451.052.360,60	145,62	<p>Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melebihi target sebesar 45,62% disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembayaran pajak tenaga Listrik dari Perusahaan hulu migas petrocina internasional. jabung Ltd yang baru bisa dibayarkan dari tahun 2025 dan adanya kenaikan tarif dari sebelumnya Rp.704,- menjadi Rp.1.115,-/per KWH dari tanggal 08 juli 2025 - sedangkan untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan mengalami kenaikan dikarenakan adanya kegiatan hiburan isidentil yang dilaksanakan oleh PRIMIKOPAD Kodim 019 Tanjab di Alun-alun Kuala Tungkal.
		4.150.000.000,00	3.573.216.287,00	86,10	
	PBJT- Makanan dan/ atau Minuman	18.892.866.459,00	30.378.708.920,60	160,79	
	PBJT- Tenaga Listrik	550.000.000,00	427.555.153,00	77,74	
	PBJT- Jasa Perhotelan	50.000.000,00	49.832.000,00	99,66	
	PBJT - Jasa Parkir	15.000.000,00	21.740.000,00	144,93	
	PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan				
8.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.719.372.450,00	12.329.544.500,00	141,40	<p>Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melebihi target sebesar 41,40% disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat pendapatan PKB meningkat. - Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah bagi yang menunggak pajak.
9.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.333.020.307,00	12.826.360.000,00	174,91	<p>Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melebihi target sebesar 74,91% disebabkan:</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan transaksi jual-beli kendaraan. - Harga kendaraan yang tinggi membuat nilai transaksi dan pendapatan opsen bea balik nama meningkat. - Pengawasan yang efektif terhadap transaksi jual beli kendaraan dan pembayaran opsen bea balik nama. - Penegakan hukum yang ketat terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak opsen bea balik nama. - Adanya pembayaran pajak KB tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 sehingga menyebabkan tercapainya realisasi.
B.	RETRIBUSI DAERAH	46.228.769.016,00	35.284.013.217,00	76,32		
12.	Retribusi Jasa Umum	43.283.329.016,00	32.892.426.520,00	75,99		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	43.283.329.016,00	32.688.358.570,00	75,52	OPD Dinas Kesehatan	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	81.000.000,00	86.384.000,00	106,65	OPD Dinas Lingkungan Hidup	
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	68.600.000,00	68,60	OPD Dinas Perhubungan	
	Retribusi Pelayanan Pasar	112.957.000,00	253.917.950,00	224,79	OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	OPD Dinas Perhubungan	
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	-	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	OPD Dinas Kominfo	
13.	Retribusi Jasa Usaha	1.444.440.000,00	1.134.858.680,00	78,57		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	605.440.000,00	484.624.380,00	80,04	-	
	Retribusi Terminal	-	-	-	OPD Dinas Perhubungan	
	Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan	700.000.000,00	476.990.300,00	68,14	OPD Dinas Perhubungan	
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	102.000.000,00	127.742.000,00	125,24	OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	37.000.000,00	45.502.000,00	122,98	OPD Dinas Perikanan	

14.	Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1.501.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00	1.256.728.017,00 102.877.065,00 695.832.552,00 458.018.400,00	83,73 10.287,71 69,58 91,60	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang OPD Dinas Tenaga Kerja
C.	HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	11.612.944.001,00	12.573.181.989,21	108,27	
15.	Bank Jambi (Deviden)	10.336.062.000,00	11.490.413.029,21	111,17	
16.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.276.882.001,00	1.082.768.960,00	84,80	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
D.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	35.124.291.362,00	60.106.355.869,40	171,12	
17.	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Di Pisahkan	244.000.000,00	1.932.838.380,00	792,15	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Penerimaan Jasa Giro	3.348.100.000,00	2.912.953.198,37	87,00	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	260.000.000,00	201.750.000,00	77,60	OPD Dinas Koperindagkop
20.	Pendapatan Bunga	3.520.000.000,00	3.359.727.681,49	95,45	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	3.056.742,78	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah

23.	Pendapatan Denda Pajak	31.350.000,00	91.568.617,00	292,00	OPD Badan Pendapatan Daerah
24.	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	
25.	Pendapatan Dari Pengembalian	6.818.200.500,00	21.458.226.919,87	314,72	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
26.	Pendapatan BLUD	20.902.640.862,00	30.146.234.329,89	144,22	OPD Dinas Kesehatan

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2025

No.	Jenis Penerimaan	2025		Alasan	
		Target	Realisasi		
1.	PENDAPATAN TRANSFER	1.932.415.899.162,00	1.856.626.940.964,00	96,08	Penerimaan Pendapatan Transfer tidak mencapai target disebabkan : - Kemampuan keuangan negara - Terkait kebijakan fiskal ada dikemenuke selaku pengurus kebijakan fiskal yang dipengaruhi kondisi ekonomi nasional dan ekonomi global.
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT	1.848.691.101.000,00	1.777.979.083.034,00	96,18	
1.	Dana Desa	97.926.532.000,00	96.986.676.760,00	99,04	
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.007.253.924.000,00	944.217.914.252,00	93,74	
	Dana Bagi Hasil Pajak	292.048.588.000,00	285.264.800.252,00	97,68	
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA)	709.263.395.000,00	653.011.173.000,00	92,07	
	Dana Bagi Hasil Lainnya	5.941.941.000,00	5.941.941.000,00	100,00	
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	554.801.689.000,00	554.087.958.970,00	99,87	
	Dana Alokasi Umum (DAU)	538.024.432.000,00	537.415.003.253,00	99,89	
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah	12.777.257.000,00	12.672.955.717,00	99,18	

4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	188.708.956.000,00	182.686.533.052,00	96,81
	DAK Fisik	16.494.303.000,00	16.291.750.307,00	98,77
	DAK Non Fisik	172.214.653.000,00	166.394.782.745,00	96,62

	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN DAERAH	83.724.798.162,00	78.647.857.930,00	93,94
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.854.798.162,00	60.577.857.930,00	93,41
	a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.578.650.168,00	8.578.650.168,00	100,00
	b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.433.383.574,00	9.355.683.060,00	145,42
	c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.482.297.496,00	26.662.924.768,00	87,47
	d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	188.153.221,00	107.794.677,00	57,29
	e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.172.313.703,00	15.872.805.257,00	82,79
2.	Bantuan Keuangan	18.870.000.000,00	18.070.000.000,00	95,76
	Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi	18.870.000.000,00	18.070.000.000,00	95,76

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➤ Sumber Daya Aparatur

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 111 Orang, terdiri dari PNS sebanyak 43 Orang, PPPK 5 Orang, PPPK PW 55 Orang dan Non ASN sebanyak 8 Orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada sebagai berikut:

No	Pegawai	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	43
2.	PPPK	5
3.	PPPK PW	55
4.	Non ASN	8
Total		111

Dari jumlah pegawai tersebut diatas, dapat di klarifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

Tabel a – Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol	PNS	PPPK	PPPK PW	Non ASN	Jumlah
II	4	-	-	-	4
III	35	-	-	-	35
IV	4	-	-	-	4
Tenaga Kontrak	-	5	55	8	68
Total	43	5	55	8	111

Tabel b – Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	PPPK	PPPK PW	Non ASN	Jumlah
Laki-laki	21	3	25	5	54
Perempuan	22	2	30	3	57
Total	43	5	55	8	111

Sedangkan penugasannya ke subunit sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| 1) Sekretariat | : 31 Orang |
| 2) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian | : 23 Orang |
| 3) Bidang Penilaian dan Penetapan | : 24 Orang |
| 4) Bidang Penagihan dan Keberatan | : 16 Orang |
| 5) Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | : 17 Orang |

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatannya:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1) Eselon II B (Kepala Badan) | : 1 Orang |
| 2) Eselon III A (Sekretaris) | : 1 Orang |
| 3) Eselon III B (Kepala Bidang) | : 4 Orang |
| 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/JFT) | : 15 Orang |
| 5) Pelaksana | : 22 Orang |

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

Tabel c – Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
Strata-2 (S2)	5	-	1	-	6
Strata-1 (S1)	25	-	33	5	63
Sarjana Terapan/D4	-	-	-	1	1
Sarjana Muda/D3	4	-	1	-	5
SLTA/SMK	9	-	23	2	34
SD	-	-	2	-	2
Total	43	-	60	8	111

Tabel d – Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
Magister					
1. Magister Ekonomi	3	-	1	-	4
2. Magister Sosial dan Politik	2	-	-	-	2
Sarjana					
1. Ilmu Sains/Biologi	-	-	-	-	-
2. Ilmu Sosial	-	-	-	-	-
3. Ilmu Ekonomi Syariah			1	1	2
4. Ilmu Ekonomi Manajemen	13	-	13	-	26
5. Ilmu Ekonomi Akutansi	1	-	-	-	1
6. Ilmu Ekonomi Pembangunan	1	-	2	2	5

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
7. Ilmu Pendidikan	-	-	4	-	4
8. Ilmu Pemerintahan	-	-	1	-	1
9. Ilmu Administrasi Negara	-	-	1	-	1
10. Ilmu Administrasi Publik	3	-	-	-	3
11. Ilmu Administrasi Perpajakan	2	-	-	-	2
12. Pertanian	1	-	-	-	1
13. Hukum	1	-	2	2	5
14. Ilmu Komunikasi dan penyiaran Islam	2	-	6	-	8
15. Teknik Informatika	-	-	1	-	1
16. Kehutanan	1	-	1	-	2
17. Kesehatan	-	-	1	-	1
Sarjana Terapan					
1. Perpajakan	-	-	-	1	1
Sarjana Muda					
1. Manajemen Informatika	1	-	-	-	1
2. Teknik Informatika	1	-	-	-	1
3. Akutansi Keuangan	1	-	1	-	2
4. Manajemen Perusahaan	1	-	-	-	1
5. Komputer	-	-	-	-	-
Menengah Kejuruan	5	-	4	-	9
Menengah Atas	4	-	19	2	25
Sekolah Dasar	-	-	2	-	2
Total	43	-	60	8	111

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini:

Tabel e – Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan

Jabatan/Staf	Jumlah
Spama/Diklat PIM III	-
Adum/Adumla/Diklat	4
Total	4

➤ **Sarana Prasarana**

Pada saat ini Kantor Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2025 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per 31 Desember 2025

Uraian	2025
ASET	19.171.350.555,12
ASET LANCAR	2.286.914.124,86
Piutang Pendapatan	9.375.438.952,50
Piutang Pajak Daerah	9.375.438.952,50
Penyisihan Piutang	(7.575.617.022,64)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(7.575.617.022,64)
Beban dibayar di muka	16.614.975,00
Beban Jasa dibayar di muka	16.614.975,00
Persediaan	470.477.220,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	470.477.220,00
ASET TETAP	16.746.593.465,26
Peralatan dan Mesin	10.200.836.678,47
Alat Angkutan	2.567.621.300,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	84.600.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.661.863.422,47
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	643.994.000,00
Komputer	3.240.257.956,00
Peralatan Olahraga	2.500.000,00
Gedung dan Bangunan	19.467.898.888,26
Bangunan Gedung	19.467.898.888,26
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.531.197,00
Instalasi	96.531.197,00
Akumulasi Penyusutan	(13.018.673.298,47)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.301.537.724,47)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.687.749.113,00)

Uraian	2025
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(29.386.461,00)
ASET LAINNYA	137.842.965,00
Aset Tidak Berwujud	1.035.290.700,00
Aset Tidak Berwujud	1.035.290.700,00
Aset Lain-lain	2.034.953.623,00
Aset lain-lain	2.034.953.623,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(903.296.900,00)
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	(903.296.900,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.029.104.458,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.029.104.458,00)
JUMLAH ASET	19.171.350.555,12
KEWAJIBAN	36.076.080,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	36.076.080,00
Pendapatan Diterima Dimuka	36.076.080,00
Pendapatan Diterima Dimuka – Pajak Daerah	36.076.080,00
JUMLAH KEWAJIBAN	36.076.080,00
EKUITAS	19.135.274.475,12
EKUITAS	19.135.274.475,12
Ekuitas	78.974.251.968,35
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(59.838.977.493,23)
JUMLAH EKUITAS	19.135.274.475,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19.171.350.555,12

➤ **Pendanaan**

Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 13.653.679.833,00 terealisasi Rp. 11.752.173.212,37 atau 86,07 % yang terdiri dari:

1. Belanja Operasional dari anggaran Rp. 13.244.364.883,00 terealisasi Rp. 11.359.817.562,37 atau 85,77% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.884.547.320,63 atau 14,23%
2. Belanja Modal dari anggaran Rp. 409.314.950,00 terealisasi Rp. 392.355.650,00 atau 95,86% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.959.300 atau 4,14%

5. Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mendukung sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dengan Target sebesar 6,19%.

Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran		Realisasi	
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan	
				Jumlah	%
PROGRAM PENDUKUNG					
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.976.854.783	85,41	11.979.610.133	86,03
PROGRAM UTAMA					
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.747.057.800	14,59	1.674.069.700	13,97
JUMLAH 2025		13.723.912.583	100,00	13.653.679.833	99,49

Dari tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 1 Program Pendukung dan 1 Program Utama. Program Pendukung dengan penyerapan anggaran 86.03% sebagai efisiensi anggaran Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah setelah APBDP Tahun 2025 Penyerapan Anggaran sebesar 13,97%.

Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan Indikator dan Target Kinerja Kepala Bidang yang dijadikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PK) Eselon III antara lain:

1. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian

Bidang pendaftaran, Pendataan dan pengendalian mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengendalian Pajak Daerah.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang pendaftaran, pendataan dan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 yaitu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah antara lain:

1. Melakukan pendataan Objek/ wajib Pajak daerah Baru dengan target 2330 SPOP/SPTPD terealisasi 7060 SPOP/SPTPD terdiri dari:
 - PBB-P2 dari target 2000 SPOP terealisasi 6322 SPOP
 - 9 pajak daerah lainnya 330 SPTPD terealisasi 738 SPTPD
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dengan target 125.369 SPOP/SPTPD terealisasi 19.555 SPOP/SPTPD
3. Membuat dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pengawasan pajak daerah dan laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah kedalam buku induk wajib pajak serta buku perjenis pajak daerah.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	▪Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6,19%	30,01%	484,78%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		123.482.215.500	179.463.133.164,21	145,34%	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	60 Layanan	100,00%	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	

2. Bidang Penilaian dan Penetapan

Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang penilaian dan penetapan badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat untuk mendukung tercapainya sasaran strategis badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2025 yaitu “meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain:

1. Melakukan penetapan surat ketetapan pajak daerah dengan target 127.574 SPPT/SSPD/SKPD/SPTPD terealisasi 123.149 SPT/SSPD/SKPD/SPTPD yang terdiri dari:
 3. PBB-P2 dengan target 116.534 SPPT terealisasi 108.115 SPPT.
 4. BPHTB dengan target 500 SSPD terealisasi 1.805 SSPD
 5. 9 Pajak Daerah lainnya dengan target 10.540 SKPD/SPTPD terealisasi 13.229 SKPD/SPTPD.
2. Melakukan penyesuaian NJOP PBB-P2 dan BPHTB dengan target 2.000 Objek Pajak terealisasi 3.331 Objek Pajak.
3. Membuat Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah
 6. Surat Ketetapan 9 Pajak Daerah (SKPD/SPTPD)
 7. Surta Ketetapan PBB-P2 (SPPT)
 8. Surat Ketetapan BPHTB (SSPD)

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang Penilaian dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	•Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6,19%	30,01%	484,78%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		123.482.215.500	179.463.133.164,21	145,34%	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	2500 OP	3331 OP	133,24%	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	

3. Bidang Penagihan dan keberatan

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, kegiatan penagihan dan keberatan.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang penagihan dan keberatan badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat untuk mendukung tercapainya sasaran strategis badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2025 yaitu “meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain:

1. Melakukan penagihan pajak daerah dengan target 122.863 STTS/SPPD terealisasi 102.453 STTS/SPPD yang terdiri dari:
 - PBB-P2 dengan target 107.990 STTS terealisasi 89.247 STTS
 - 9 Pajak Daerah lainnya dengan target 13.873 SSPD terrealisasi 13.206 SSPD

2. Membuat dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah dan data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi serta menyusun daftar ketetapan pajak daerah yang tidak tertagih (terutang).

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang penagihan dan keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6,19%	30,01%	484,78%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		123.482.215.500	179.463.133.164,21	145,34%	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	-	-	Tidak ada yang mengajukan keberatan ditahun ini

4. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah. Dalam melakukan tugas bidang pengembangan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, perhitungan potensi pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah serta penyusunan draft regulasi PAD. Pada Tahun 2025 untuk layanan informasi pajak daerah yang muktahir dan akurat terealisasi 100% dengan tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah dengan memakai 4 Aplikasi antara lain: BPHTB, PBB, PDL (9 Pajak) dan Web Bapenda.

Indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat yang mendukung tercapainya sasaran strategis badan pendapatan daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2025 yaitu “meningkatnya pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain:

1. Melakukan penertiban pengelolaan penerimaan daerah dengan menyusun dokumen rencana pengelolaan pajak daerah dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.
2. Melaksanakan pelayanan pajak daerah melalui teknologi informasi kebijakan pajak daerah dan potensi sumber-sumber pendapatan.
3. Membuat dokumen hasil analisis Pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah serta laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah serta potensi sumber-sumber pendapatan.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6,19%	30,01%	484,78%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		123.482.215.500	179.463.133.164,21	145,34%	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	
	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100,00%	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	100,00%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	

2. SASARAN 2 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 82,06

Hasil Survei pengukuran SKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan 9 unsur penilaian antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk / Hasil Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
9. Mekanisme Pengaduan Pelayanan

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Capaian Nilai SKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2025 terealisasi 82,06 dari target 82,06 dengan capaian kinerja 100,00 %.

- Nilai AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan, Implementasi Pelaporan dan Evaluasi SAKIP Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari target Nilai 78,44 terealisasi 81,05 dengan capaian 103,33%.

1. Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sekretariat

Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran 2 pada Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Nilai Akip.

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase temuan audit pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target 90%
- Persentase Pemenuhan Komponen SKM dengan target 100%
- Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP dengan target 100%

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
I.	Perogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SKM		82,06	82,06	100,00%	
		Nilai SAKIP		78,44	81,05	103,33%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	100%	
		▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	▪ Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dok	4 Dok	100%	
		▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	▪ Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	12 Lap	12 Lap	100%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok	96,97%	96,97%	
		▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	90,91%	90,91%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	100,00%	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	100%	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	100%	
	▪ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	12 Lap	100%	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100,00%	
	▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	100,00%	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100%	
	▪ Penyedia Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	
	▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan		Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	12 Dok	12 Dok	100,00%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	100,00%	
6.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	
	▪ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	4 Unit	100,00%	
	▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	20 Unit	100,00%	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	12 Lap	100,00%	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100,00	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	48 Unit	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	92 Unit	92 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dengan target Rp. 53.655.609.216,00 terealisasi sebesar Rp. 71.591.150.705,60 atau 133,43%, sedangkan jumlah Belanja yang di anggarkan pada APBDP Bapenda Tahun 2025 sebesar Rp. 13.653.679.833,00 terealisasi Rp. 11.752.173.212,37 atau 86,07% dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
4.	<u>PENDAPATAN – LRA</u>	53.655.609.216,00	71.591.150.705,60	133,43
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	53.655.609.216,00	71.591.150.705,60	133,43
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	53.624.259.216,00	71.499.582.088,60	133,33
4.1.1.06.	Pajak Hotel – LRA			
4.1.1.07.	Pajak Restoran – LRA			
4.1.1.08.	Pajak Hiburan – LRA			
4.1.1.09.	Pajak Reklame – LRA	514.000.000,00	469.201.557,00	91,28
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LRA			
4.1.1.11.	Pajak Parkir – LRA	0,00	39.307.400,00	0,00
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LRA	540.000.000,00	404.165.358,00	74,85
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	60.000.000,00	51.850.000,00	86,42
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	2.000.000.000,00	1.002.259.300,00	50,11
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)– LRA	5.300.000.000,00	4.662.955.617,00	87,98
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	5.500.000.000,00	3.021.585.236,00	54,94
4.1.1.18.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	0,00	2.280.608.160,00	0,00
4.1.1.19.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23.657.866.459,00	34.411.744.960,60	145,46

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
4.1.1.20.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.719.372.450,00	12.329.544.500,00	141,40
4.1.1.21.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.333.020.307,00	12.826.360.000,00	174,91
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	31.350.000,00	91.568.617,00	292,08
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak – LRA	31.350.000,00	91.568.617,00	292,08
5.	BELANJA	13.653.679.833,00	11.752.173.212,37	86,07
5.1.	BELANJA OPERASI	13.244.364.883,00	11.359.817.562,37	85,77
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.805.100.383,00	6.593.378.947,37	84,48
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.703.916.947,00	3.414.294.366,00	92,18
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.614.958.594,00	2.426.510.604,00	92,79
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.486.224.842,00	752.573.977,37	50,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.439.264.500,00	4.766.438.615,00	87,63
5.1.02.01	Belanja Barang	1.720.063.000,00	1.532.956.898,00	89,12
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.622.897.500,00	2.245.958.441,00	85,63
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	519.398.000,00	477.822.640,00	92,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	486.606.000,00	419.400.636,00	86,19
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.300.000,00	90.300.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	409.314.950,00	392.355.650,00	95,86
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.314.950,00	392.355.650,00	95,86
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	154.512.000,00	139.782.000,00	90,47
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.302.950,00	36.741.000,00	98,49
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	217.500.000,00	215.832.650,00	99,23
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset tidak berwujud			
5.Z	SURPLUS/ (DEFISIT)	40.001.929.383,00	59.838.977.493,23	149,59

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Secara umum, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Penerimaan daerah dari target sebesar Rp. 2.079.006.162.757,00 terealisasi sebesar Rp. 2.036.090.074.128,21 atau mencapai 97,94%. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 122,43% dari target yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024.

Indikator kinerja utama berupa tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan capaian yang sangat baik, dimana realisasi pertumbuhan PAD mencapai 30,01% atau melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian sebesar 133,43% dari target. Capaian tersebut didukung oleh beberapa jenis pajak daerah yang realisasinya melampaui target, diantaranya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasinya belum mencapai target sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pengelolaan pendapatan daerah ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus melakukan upaya perbaikan melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah,

peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, penguatan pengelolaan data dan sistem informasi pendapatan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan pengelolaan pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan daerah.

Kuala Tungkal, 10 - 03 - 2026



KEPALA BAPENDA

SUGIANTO, SE, MM

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19670317 199002 1 001